

KONSUMSI DAGING SAPI DI KABUPATEN SAMPANG

Yulia Krisnawati Syukri dan Rani Nur Fitrianti

¹⁾Dinas Pertanian Kabupaten Sampang

²⁾Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Madura

Author e-mail : krisnasyukri40@gmail.com

Abstrak

Pengembangan subsektor peternakan sebagai sumber penyediaan protein hewani, selama 10 tahun terakhir menunjukkan hasil yang cukup nyata dalam berbagai aspek, di antaranya produksi daging meningkat dari 1.508.200 ton menjadi 2.613.200 ton atau naik 4,01%/tahun, telur meningkat dari 736.000 ton menjadi 1.149.000 ton atau naik 5,6 %/ tahun, dan susu meningkat dari 433.400 ton menjadi 550.000 ton atau naik 2,69 %/tahun. Dengan tingkat pencapaian produksi tersebut maka tingkat konsumsi masyarakat, khususnya protein hewani asal ternak, meningkat dari 4,19 g/kapita/hari menjadi 5,46 g/kapita/hari atau naik sekitar 3,08%/tahun. Saat ini rata-rata konsumsi daging sapi penduduk Indonesia masih sangat kecil (< 2 kg/kapita/tahun). Untuk menghitung tingkat konsumsi masyarakat dan perkiraan kecukupan persediaan makanan secara nasional pada suatu wilayah atau negara dilakukan dengan cara *Food Balance Sheet* (FBS) yaitu gambaran komprehensif mengenai ketersediaan komoditas makanan dari sebuah wilayah pada satu periode tertentu, dimana partisipasi konsumsi per kapita komoditas tersebut sangat tinggi sehingga sebagai denominatormya adalah total penduduk. Maka dengan menggunakan cara *Food Balance Sheet* (FBS), produksi daging sapi di Kabupaten Sampang adalah 200 kg x 4.102 ekor adalah 820.400 kg daging sapi, jumlah penduduk sebanyak 884.264 jiwa, maka diketahui bahwa konsumsi daging sapi di Kabupaten Sampang sebesar $820.400 \text{ kg} \div 884.264 \text{ jiwa} = 0,93 \text{ kg/kapita/tahun}$. Tingkat konsumsi daging sapi di Kabupaten Sampang masih sangat rendah, jauh dari rata-rata tingkat konsumsi daging sapi nasional selain daya beli masyarakat yang rendah, bisa juga karena melimpahnya komoditas substitusi yaitu ikan laut tersedia dengan harga yang lebih murah dari pada daging sapi.

Kata Kunci : konsumsi, daging, food balance sheet (FBS)

Abstract

The development of the livestock sub-sector as a source of supply of animal protein, over the past 10 years has shown quite tangible results in various aspects, including meat production increasing from 1,508,200 tons to 2,613,200 tons or an increase of 4.01%/year, eggs increasing from 736,000 tonnes to 1,149,000 tonnes, an increase of 5.6%/year, and milk increased from 433,400 tonnes to 550,000 tonnes, an increase of 2.69%/year. With this level of production achievement, the level of public consumption, especially animal protein from livestock, increased from 4.19 g/capita/day to 5.46 g/capita/day or an increase of around 3.08%/year. Currently, the average beef consumption in Indonesia is still very low (<2 kg/capita/year). To calculate the level of public consumption and estimates of the adequacy of food supplies nationally in a region or country, a Food Balance Sheet (FBS) is used, which is a comprehensive description of the availability of food commodities from a region in a certain period, where participation in per capita consumption of these commodities is very high. so that the denominator is the total population. So by using the Food Balance Sheet (FBS) method, beef production in Sampang Regency is 200 kg x 4,102 head is 820,400 kg of beef, the population is 884,264 people, it is known that beef consumption in Sampang Regency is $820,400 \text{ kg} \div 884,264 \text{ people} = 0.93 \text{ kg/capita/year}$. The level of consumption of beef in Sampang Regency is still very low, far from the average national level of beef consumption. In addition to the low purchasing power of the people, it could also be due to the abundance of substitute commodities, namely seafood available at a cheaper price than beef.

Keywords : Consumption, Meat, Food Balance Sheet (FBS)

PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan essensial dan komoditas paling strategis dalam kehidupan manusia, pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hak azazi manusia. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang

Ketahanan Pangan menegaskan bahwa untuk memenuhi konsumsi yang terus berkembang dari waktu ke waktu, upaya penyediaan pangan dilakukan dengan mengembangkan sistem produksi pangan yang berbasis pada sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal, mengembangkan efisiensi sistem usaha pangan, mengembangkan

teknologi produksi pangan, mengembangkan sarana dan prasarana produksi pangan dan mempertahankan serta mengembangkan lahan produktif. Dewan ketahanan Pangan melalui Kebijakan Umum Ketahanan Pangan tahun 2006 – 2009 menyatakan bahwa tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah mempertahankan ketersediaan energi minimal 2200 kkal/kap/hari dan penyediaan protein minimal 57 gr/kap/hari. Salah satu pangan penyumbang gizi terbaik berasal dari protein hewani.

Pengembangan subsektor peternakan sebagai sumber penyediaan protein hewani, selama 10 tahun terakhir menunjukkan hasil yang cukup nyata dalam berbagai aspek, di antaranya produksi daging meningkat dari 1.508.200 ton menjadi 2.613.200 ton atau naik 4,01%/tahun, telur meningkat dari 736.000 ton menjadi 1.149.000 ton atau naik 5,6 %/ tahun, dan susu meningkat dari 433.400 ton menjadi 550.000 ton atau naik 2,69 % /tahun. Dengan tingkat pencapaian produksi tersebut maka tingkat konsumsi masyarakat, khususnya protein hewani asal ternak, meningkat dari 4,19 g/kapita/hari menjadi 5,46 g/kapita/hari atau naik sekitar 3,08%/tahun. Saat ini rata-rata konsumsi daging sapi penduduk Indonesia masih sangat kecil (< 2 kg/kapita/tahun), masih jauh di bawah rata-rata konsumsi daging di negara-negara berkembang (5 kg/kapita/tahun) maupun negara-negara maju yaitu 25 kg/kapita/tahun, apalagi dibandingkan dengan rata-rata konsumsi di Australia yang sudah mendekati 40 kg/kapita/tahun. Bila dalam 5 tahun ke depan ada tambahan permintaan sekitar 1 kg/kapita/tahun maka diperlukan tambahan pasokan sapi sebanyak 1 juta ekor/tahun (Natasasmita dkk, 1987).

Beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam memacu produksi ternak dalam negeri seperti: (1) pengembangan pakan ternak, (2) peningkatan mutu bibit melalui program inseminasi buatan dan (3) program pemberantasan penyakit, sehingga diharapkan upaya ini akan dapat mengimbangi permintaan produk peternakan yang meningkat cepat atau bahkan lebih cepat dari laju pendapatan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa struktur konsumsi bahan pangan telah bergeser dari dominan produk karbohidrat ke bahan pangan sumber protein terutama daging sapi. Selain karena meningkatnya pendapatan, kecenderungan perubahan pola konsumsi juga didorong oleh urbanisasi dan pengetahuan masyarakat akan gizi yang makin

baik. Perpaduan antara peningkatan konsumsi per kapita dan penambahan penduduk akan menyebabkan permintaan terhadap produk peternakan terus meningkat dengan laju yang makin pesat. Secara umum kondisi faktual industri peternakan sapi potong yang ada sekarang ini di tanah air adalah sebagai berikut :

1. Peternakan sapi potong di Indonesia didominasi oleh peternakan rakyat dengan tingkat kepemilikan rata-rata 2 - 4 ekor. Berdasarkan data statistik Peternakan terdapat sekitar 4 juta rumah tangga peternak sapi potong yang memelihara sekitar 10,5 juta ekor sapi. Ditinjau dari sebaran populasi, sekitar 45 persen dari populasi terkonsentrasi di Pulau Jawa khususnya Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Suatu realita bahwa untuk memenuhi kebutuhan daging nasional yang nota bene per kapita per tahun masih sangat kecil sekitar 1,72 kg/kapita/tahun, populasi sapi potong yang ada sekarang ini sekitar 10,5 juta ekor, tidak mampu untuk memenuhinya (Direktorat Jenderal Peternakan, 2000).

Saat ini kebutuhan daging sapi nasional per tahun mencapai 4 juta ekor dari impor dan lokal. Sebanyak 4 juta ekor sapi itu setara dengan 600.000 ton daging sapi, dengan berat sapi rata-rata 150 kg. Dimana sebanyak 85% kebutuhan daging dipasok dari sapi lokal, sedangkan 15% lainnya adalah impor. Sehingga diperkirakan tingkat konsumsi perkapita daging sapi nasional tahun 2013 dengan jumlah penduduk Indonesia 240 juta jiwa adalah 2,5 kg/kapita/tahun (Menteri Pertanian RI).

Jawa Timur, dilihat dari produksi sapi per tahun sebanyak 4,9 juta ekor telah mencapai swasembada daging sapi, dengan wilayah yang memiliki populasi sapi tertinggi di Jawa Timur adalah Kabupaten Sumenep, dengan jumlah populasi 402.532 ekor, Kabupaten Pamekasan sebanyak 351.769 ekor, Kabupaten Sampang 221.441 ekor, dan Kabupaten Bangkalan 218.841 ekor (Portal Pemerintah Provinsi Jawa Timur). Disisi lain Kabupaten Sampang dengan jumlah populasi terbesar ketiga di pulau Madura memiliki kesenjangan wilayah dengan kabupaten lainnya di Jawa Timur. Secara umum Kabupaten Sampang masih menduduki tingkat terendah di Pulau Madura jika dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang berarti masih masuk dalam kategori daerah tertinggal, faktor yang

menyebabkan pendapatan perkapita belum maksimal adalah lantaran kondisi geografis, seperti halnya lahan pertanian yang hanya dapat digunakan satu kali dalam setahun. Pasalnya, dari 883.282 penduduk di Kabupaten Sampang mayoritas berprofesi atau bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani, selain itu dari faktor pendidikan dan kesehatan yang masih jauh dari kata ideal (BPS Kabupaten Sampang).

MATERI DAN METODE

Kajian tentang konsumsi daging sapi ini termasuk dalam penggolongan penelitian *case study* (studi kasus). Menurut Sugiyono (2010) *case study* (studi kasus) adalah pendekatan yang bertujuan untuk mempertahankan keutuhan atau *wholeness* dari objek. Studi kasus (*case study*) berguna untuk memberikan informasi pada penelitian lebih lanjut, karena dapat memberikan penjelasan tentang variable-variabel penting serta proses pengamatan.

Subyek penelitian yang digunakan adalah populasi atau total sampling. Menurut Sugiyono (2010) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek atau subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. Dalam pelaksanaan pengkajian, metode yang digunakan adalah metode survei dan wawancara yaitu pengumpulan informasi dari responden dengan alat bantu berupa daftar pertanyaan dan pengamatan langsung. Data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Rumah Potong Hewan (RPH) yang ada di Kabupaten Sampang dengan cara wawancara serta mengajukan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi-instansi terkait dengan masalah-masalah yang diteliti.

Untuk menghitung tingkat konsumsi masyarakat dan perkiraan kecukupan persediaan makanan secara nasional pada suatu wilayah atau negara dilakukan dengan cara *Food Balance Sheet* (FBS). *Food Balance Sheet* (FBS) adalah sebuah gambaran komprehensif mengenai ketersediaan komoditas makanan dari sebuah wilayah pada satu

periode tertentu, dimana partisipasi konsumsi per kapita komoditas tersebut sangat tinggi sehingga sebagai denominatornya adalah total penduduk (Tjeppy D Soedjana, 2013). Pemerintah dalam hal ini Departemen Pertanian menghitung tingkat konsumsi daging sapi menggunakan cara *Food Balance Sheet* (FBS), sehingga cara ini pula yang digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan untuk menganalisis tingkat kesejahteraan penduduk dan konsumsi daging sapi dengan menggunakan analisa deskriptif, setelah diketahui tingkat konsumsi daging sapi.

Untuk mengetahui hubungan antara tingkat kesejahteraan penduduk dengan tingkat konsumsi daging sapi dianalisa secara deskriptif.

Langkah-langkah perhitungan FBS:

1. Menghitung kapasitas produksi sapi potong dalam satu tahun (Pemotongan sapi hanya diperbolehkan 10% dari total populasi yang ada sesuai dengan amanat Undang-undang Peternakan No. 18 Tahun 2009
2. Menghitung jumlah pemotongan sapi dan berat rata-rata sapi yang dipotong
3. Membagi jumlah produksi daging sapi dengan jumlah penduduk wilayah Batasan Operasional
1. Kapasitas produksi adalah kecukupan persediaan sapi potong
2. Tingkat konsumsi adalah jumlah daging sapi yang dikonsumsi perkapita
3. Pemotongan sapi adalah jumlah sapi yang diperbolehkan dipotong sesuai undang-undang yang berlaku saat ini
4. Berat sapi yang dipotong adalah penyetaraan produksi daging sapi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara keseluruhan Kabupaten Sampang mempunyai luas wilayah 1233,33 Km². Secara administrasi wilayah perencanaan terdiri atas seluruh wilayah yang termasuk dalam Kabupaten Sampang terdiri dari 14 kecamatan, dengan 6 kelurahan dan 180 desa. Adapun kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sampang tersebut meliputi Kecamatan Sreseh, Kecamatan Torjun, Kecamatan Omben, Kecamatan Pangarengan, Kecamatan Sampang, Kecamatan Camplong, Kecamatan Jrengik, Kecamatan Kedungdung, Kecamatan Tambelangan, Kecamatan Banyuates, Kecamatan Robatal, Kecamatan Karang Penang, Kecamatan Ketapang dan Kecamatan Sokobanah.

Kabupaten Sampang dengan jumlah populasi terbesar ke tiga di Jawa Timur setelah Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Tuban. Dengan populasi sapi potong sebanyak 221.441 ekor merupakan potensi yang sangat besar dalam pemenuhan kebutuhan daging sapi, baik untuk pasar lokal Kabupaten Sampang maupun untuk pasar diluar Kabupaten Sampang. Kecukupan persediaan sapi potong di Kabupaten Sampang apabila dihubungkan dengan Undang-undang Peternakan Nomor : 18 Tahun 2009, dimana salah satunya adalah kapasitas produksi sapi potong dalam satu tahun merupakan akumulasi jumlah pemotongan sapi dan jumlah sapi yang keluar wilayah hanya diperbolehkan 10% dari total populasi yang ada.

Tabel 1. Jumlah Pemotongan Ternak Sapi Tahun 2013 Kabupaten Sampang

No.	Kecamatan	Ternak Sapi Yang Dipotong (ekor)
1	Sampang	898
2	Camplong	-
3	Omben	1112
4	Torjun	342
5	Jrengik	-
6	Sreseh	-
7	Kedungdung	100
8	Robatal	-
9	Karang Penang	124
10	Ketapang	1124
11	Tambelangan	182
12	Pangarengan	-
13	Banyuates	180
14	Sokobanah	40
Jumlah		4102

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sampang

Mengacu pada aturan tersebut maka jumlah sapi yang boleh dipotong atau keluar dari Kabupaten Sampang adalah : 221.441 ekor x 10% = 22.144 ekor sedangkan jumlah pemotongan sapi di Kabupaten Sampang pada Tahun 2013 sebanyak 4.102 ekor seperti tabel 2. Dari data ini bahwa jumlah sapi yang disembelih di Kabupaten Sampang hanya 18,5% dari kapasitas produksi sapi potong di Kabupaten Sampang, hal ini menunjukkan persediaan sapi potong untuk konsumsi lokal Kabupaten Sampang masih sangat aman bahkan Kabupaten Sampang dapat mengirim

persediaan sapi potongnya ke daerah konsumen sebanyak 18.000 ekor/tahun.

Dari data ini bahwa jumlah pemotongan ternak sapi di Kabupaten Sampang diperoleh dari Rumah Potong Hewan milik pemerintah maupun swasta yang ada di Kabupaten Sampang, hal ini dapat dilihat di tabel 2 yaitu jumlah Rumah Potong Hewan yang ada di Kabupaten Sampang.

Tabel 2. Jumlah Rumah Pemotongan Hewan di Kabupaten Sampang

No	Kecamatan	Pemerintah	Swasta	Jml
1	Sampang	1	-	1
2	Camplong	-	-	-
3	Omben	1	7	8
4	Torjun	1	2	3
5	Jrengik	-	-	-
6	Sreseh	-	-	-
7	Kedungdung	1	-	1
8	Robatal	-	-	-
9	Karang Penang	1	2	3
10	Ketapang	1	-	1
11	Tambelangan	1	2	3
12	Pangarengan	-	-	-
13	Banyuates	-	3	3
14	Sokobanah	-	1	1
Jumlah		7	17	24

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sampang

Perhitungan tingkat konsumsi daging sapi di Indonesia memang belum ada standar yang baku. Asosiasi importir sapi, penggemukan sapi dan para peneliti masih berbeda pendapat soal perhitungan konsumsi daging sapi. Implikasinya adalah belum adanya kesepakatan soal kebutuhan daging sapi nasional. Para peneliti menggunakan acuan konsumsi daging sapi tersebut berdasarkan konsumsi 13 jenis produk pangan yang menggunakan daging sapi sebagai produk olahan dan mengacu pada data konsumsi masyarakat khususnya rumah tangga dari survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), serta tingkat partisipasi konsumsi terhadap suatu komoditas (Tjeppy D Soedjana, 2013).

Komoditas daging sapi merupakan komoditas yang memiliki angka partisipasi konsumsi mendekati 100% memang sudah selayaknya menggunakan total penduduk sebagai denominator konsumsi per kapita per tahun. Sehingga untuk menghitung tingkat konsumsi daging sapi di Kabupaten Sampang dapat dilihat dengan menghitung jumlah pemotongan sapi dan berat rata-rat sapi yang

dipotong dan menjadi jumlah produksi daging sapi.

Apabila diasumsikan bahwa berat rata-rata sapi yang dipotong 200 kg (Reksohadiprojo, 1994), maka dengan menggunakan cara *Food Balance Sheet* (FBS), produksi daging sapi di Kabupaten Sampang adalah 200 kg x 4.102 ekor adalah 820.400 kg daging sapi. Dengan jumlah penduduk sebanyak 884.264 jiwa, maka diketahui bahwa konsumsi daging sapi di Kabupaten Sampang sebesar $820.400 \text{ kg} \div 884.264 \text{ jiwa} = 0,93 \text{ kg/kapita/tahun}$.

Prospek permintaan produk peternakan yang meningkat cepat atau bahkan lebih cepat dari laju pendapatan konsumen menunjukkan bahwa struktur konsumsi bahan pangan telah bergeser dari dominan produk karbohidrat ke bahan pangan sumber protein terutama daging sapi. Selain karena meningkatnya pendapatan kecenderungan perubahan pola konsumsi juga didorong oleh urbanisasi dan pengetahuan masyarakat akan gizi yang lebih baik. Perpaduan antara peningkatan konsumsi daging per kapita dan penambahan penduduk akan menyebabkan permintaan terhadap produk peternakan terus meningkat dengan laju yang makin pesat.

Tingkat konsumsi daging sapi di Kabupaten Sampang 0,93 kg/kapita/tahun (perhitungan diatas) apabila dibandingkan dengan tingkat konsumsi daging sapi secara nasional pada tahun 2013 sebesar 2,5 kg/kapita/tahun (Departemen Pertanian dengan cara perhitungan yang sama), masih sangat jauh. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat konsumsi daging sapi per kapita di wilayah Kabupaten Sampang sangat berhubungan dengan tingkat kesenjangan ekonomi dengan wilayah lainnya di Jawa Timur.

Kesenjangan wilayah dapat dilihat dari empat indikator yaitu, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, tingkat kemiskinan, dan tingkat kesejahteraan (RTRWP Jatim Tahun 2020). Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB di daerah tersebut. Tingkat kemiskinan dapat dilihat dari banyaknya penduduk miskin di daerah tersebut. Sedangkan tingkat kesejahteraan penduduk dapat dilihat dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Secara umum Kabupaten Sampang masih menduduki tingkat terendah di Pulau Madura jika dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang berarti masih masuk dalam kategori daerah

tertinggal, faktor yang menyebabkan pendapatan perkapita belum maksimal adalah lantaran kondisi geografis, seperti halnya lahan pertanian yang hanya dapat digunakan satu kali dalam setahun. Pasalnya, dari 883.282 penduduk di Kabupaten Sampang mayoritas berprofesi atau bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani, selain itu dari faktor pendidikan dan kesehatan yang masih jauh dari kata ideal (BPS Kabupaten Sampang).

Rendahnya tingkat konsumsi daging di Kabupaten Sampang juga dimungkinkan karena Kabupaten Sampang merupakan daerah penghasil ikan laut yang menjadi produk substitusi bagi daging sapi, karena tingkat kesukaan masyarakat terhadap produk substitusi ini sangat tinggi dan harganya relatif murah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Dengan populasi sapi potong yang tinggi, kecukupan persediaan sapi potong di Kabupaten Sampang pertahun adalah jumlah sapi yang dipotong dan dijual keluar Kabupaten Sampang lebih dari cukup
2. Tingkat konsumsi daging sapi di Kabupaten Sampang masih sangat rendah, jauh dari rata-rata tingkat konsumsi daging sapi nasional
3. Rendahnya tingkat konsumsi daging sapi di Kabupaten Sampang selain daya beli masyarakat yang rendah, bisa juga karena melimpahnya komoditas substitusi yaitu ikan laut tersedia dengan harga yang lebih murah dari pada daging sapi.

Saran

1. Untuk menjaga persediaan sapi potong di Kabupaten Sampang, hendaknya diadakan pengawasan yang ketat terhadap pemotongan sapi betina produktif
2. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya konsumsi protein hewani baik dari sapi potong maupun dari komoditas lainnya
3. Perlu diversifikasi produk olahan asal daging sapi, sehingga minat masyarakat terhadap daging sapi lokal khususnya dapat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Apfindo. 2000. Hambatan dan Tantangan Agribisnis Sapi Potong dalam Menuju Swasembada Daging Tahun 2005. Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot Indonesia.

- Atien priyanti, t.d . Soedjana, r. Matondang, dan p. Sitepu. 1997. Estimasi sistem permintaan penawaran daging sapi di propinsi lampung. Balai Penelitian Ternak P.O. Box 221, Bogor, Indonesia
- BPS Kabupaten Sampang. 2013. Radio Republik Indonesia (RRI). 17 Pebruari 2013. Reporter. Supriyadi.
- Delgado, C., M. Rosegrant, H. Steinfeld, S. Ehui, and C. Courbois. 1999. Livestock to 2020. The Next Food Revolution. International Food Policy Research Institute, Washington DC.
- Natasasrnita, S., R. Priyanto, dan M. Tauchid, D. 1987. Pengantar Evaluasi Daging. Diktat Kuliah. Fakultas Peternakan. Institut Pertanian Bogor.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 19/Permentan/OT.140/2/2010 tentang Pedoman Umum Program Swasembada Daging Sapi 2014, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor: 80
- Portal Pemerintah provinsi Jawa Timur. <http://www.jatimprov.go.id/site/jatim-siap-pasok-sapi-untuk-jabar-banten-dan-dki-jakarta/>
- Sayuti. 1994. Estimasi parameter permintaan beberapa komoditas peternakan di Jawa. Jurnal Penelitian Peternakan Indonesia
- Soepamo, 1992. Ihu dan Teknologi Daging. Gajah Mada Univesity Press. Yogyakarta
- Sugiyono,2010. Metode Penelitian Pendidikan, Alfabeta, Bandung.
- Sukirno,S. 1994. Pengantar Mikro Ekonomi. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84
- Direktorat Jenderal Peternakan. 2000. Statistik Peternakan 1999. Direktorat Jenderal Peternakan. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Ilham, N., B.Wiryono, IK. Karyasa, MNA. Kirom, dan S. Hastuti. 2001. Analisis Penawaran dan Permintaan Komoditas Peternakan Unggulan. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Kotler, P. 1995. Manajemen Pemasaran. (diterjemahkan oleh Ancella Anitawati Hermawan SE,MBA). Penerbit Salemba Empat, Jakarta